

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat dari perubahan iklim yang cukup ekstrim di dunia akhir-akhir ini maka isu lingkungan dan isu energi merupakan sebuah isu internasional yang penting. Dunia sekarang sedang berfokus pada penggunaan energi terbarukan karena melihat perubahan iklim di dunia akhir-akhir ini, terbukti dengan adanya penandatanganan *Paris Agreement* yang telah disetujui oleh 195 Negara anggota dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang di selenggarakan di Paris pada tanggal 12 Desember 2015 pada pertemuan *Conference of the Parties* (COP) 21. Dari 196 negara UNFCCC 195 negara tersebut sepakat untuk berkomitmen dalam menjaga kenaikan temperatur global abad ini di bawah 2 derajat Celcius dan untuk mendorong upaya membatasi kenaikan suhu lebih jauh ke 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Batas kenaikan 1,5 derajat Celcius merupakan batas kenaikan suhu global agar dunia relatif aman dari dampak terburuk dari perubahan iklim (UNFCCC, 2016).

Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari UNFCCC yang menyetujui *Paris Agreement* dan Indonesia juga sedang berfokus dengan permasalahan energi yang ada di Indonesia sendiri yang masih menggunakan bahan bakar kotor, hal ini tidak hanya berdampak pada Indonesia saja akan tetapi juga akan menyumbangkan dampak iklim di seluruh dunia. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah sumber energi listrik yang masih digunakan di Indonesia saat

ini, ketergantungan negara Indonesia pada pemakaian listrik dari bahan bakar kotor masih digunakan hingga saat ini, dan pemerintah Indonesia dengan pihak swasta sedang menjalankan sebuah proyek PLTU yang mempunyai kapasitas 2x1.000 MW karena kebutuhan listrik Indonesia terus meningkat 8% setiap tahunnya, pembangunan PLTU ini mulai dibangun di daerah Batang pada tahun 2016 dan perencanaan selesai pada tahun 2019.

Pembangunan PLTU ini digagas pertama kali pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2011, akan tetapi terjadi banyak sekali kendala di lapangan yang membuat proyek pembangunan PLTU Batang menjadi tertunda salah satunya masalah pembebasan lahan di sekitar wilayah pembangunan PLTU tersebut (DetikFinance, 2013).

PLTU Batang merupakan proyek yang dipegang oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang merupakan konsorsium perusahaan Jepang-Indonesia *Electric Power Development.Ltd* (J-Power) dan Itochu Corporation merupakan perusahaan yang berbasis di Tokyo-Jepang dan PT. Adaro Power (AP) perusahaan yang berbasis di Indonesia (Afriyadi, 2016). PLTU Batang disebut-sebut sebagai PLTU Terbesar se-Asia Tenggara ini berkapasitas 2x1000 Mega Watt (MW) dengan biaya pembangunan yang direncanakan sebesar US\$ 4,2 Miliar. Proyek ini juga merupakan proyek pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan hal ini merupakan pertama kalinya di Indonesia sendiri dalam skala besar. Akan tetapi proyek pembangunan PLTU Batang ini akhirnya tertunda selama 4 tahun. Setelah pergantian pemerintahan dari era Presiden SBY ke era Presiden Joko Widodo

(Jokowi), akhirnya pada tahun 2015 tepatnya bulan Agustus Presiden Jokowi meresmikan kembali proyek pembangunan PLTU Batang, meskipun belum ada keputusan *financial closing* pada saat itu, dikarenakan *financial closing* baru bisa didapatkan dari *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) ketika permasalahan pembebasan lahan sudah bisa terselesaikan setidaknya 70% (Fitra, 2016). Presiden Jokowi mengatakan bahwa proyek ini adalah proyek nasional dan untuk kepentingan nasional rakyat Indonesia, karena kebutuhan listrik Indonesia setiap tahunnya selalu naik. Bupati Batang juga mengatakan adanya PLTU Batang bisa mempengaruhi ekonomi di Batang secara positif dengan adanya investor yang masuk ke kabupaten tersebut.

Meskipun proyek pembangunan PLTU Batang telah diresmikan Presiden Jokowi, proyek tersebut belum bisa dimulai pembangunannya karena masih terkendala pembebasan lahan. Beberapa alasan umum yang mendasari adanya penolakan dari pembangunan PLTU Batang ialah karena pembangunan ini mempengaruhi kondisi ekonomi, kesehatan warga Batang dan juga masalah lingkungan di sekitar wilayah Batang.

Hal inilah yang membuat masyarakat Batang menolak adanya kehadiran dari PLTU Batang tersebut. Banyak warga Batang yang merasa dirugikan dengan kehadiran pembangunan PLTU Batang ini, karena akan mempengaruhi kelayakan hidup mereka kedepannya, karena warga Batang sudah sejak lama menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam sekitar. Warga batang juga mengajukan gugatan kepada pengadilan melihat fakta-fakta yang ada dari adanya

pembangunan PLTU Batang yang kedepannya bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat Batang yang sebelumnya makmur sejahtera menjadi kebalikannya dan beberapa hal lainnya yang sangat merugikan masyarakat Batang.

Namun penolakan warga kurang mendapat respon yang positif oleh pihak pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat. Oleh karena itu pembangunan PLTU Batang dalam hal ini banyak menarik peran NGO (*a non-governmental organization*), khususnya NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan untuk ikut berkontribusi membantu warga Batang untuk mendapatkan hak-hak mereka kembali dan menggagalkan pembangunan PLTU tersebut yang mengancam kelangsungan hidup lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Salah satu NGO yang ikut berkontribusi dalam membantu warga Batang ialah Greenpeace.

Greenpeace adalah sebuah organisasi internasional yang berjuang untuk mengampanyekan isu lingkungan secara global. Greenpeace telah mempunyai 2,8 Juta pendukung di seluruh dunia, nasional dan kantor regional di 41 negara (Greenpeace, 2008). Di Indonesia sendiri Greenpeace mulai masuk pada tahun 2005 dan terdaftar dan diakui oleh Departemen Kehakiman dan HAM. Greenpeace di Indonesia sendiri mengangkat isu kehutanan, energi, air dan kelautan sebagai fokus utamanya dalam isu-isu yang sering terjadi di wilayah Indonesia.

Kampanye isu kehutanan dan revolusi energi merupakan isu yang akhir - akhir ini sering diangkat Greenpeace ke masyarakat, dengan melihat kenyataan yang terjadi di Indonesia banyak sekali kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja untuk pembukaan lahan. Greenpeace juga terus menerus menyerukan

efisiensi energi dan peningkatan untuk penggunaan energi terbarukan untuk menghentikan penggunaan energi dari fosil yang kotor. Contohnya beberapa waktu lalu Greenpeace melakukan upaya untuk terus menyerukan efisiensi energi dengan melakukan penolakan terhadap pembangunan PLTU di Batang.

Greenpeace pun ikut membantu warga Batang untuk tetap mempertahankan hak mereka terhadap tanahnya dan juga Greenpeace sendiri menentang adanya pembangunan PLTU Batang dikarenakan beberapa hal, salah satunya efek buruk yang akan ditimbulkan dari hasil pembakaran bahan bakar utama PLTU tersebut yaitu batubara, yang diketahui sebagai energi kotor yang tidak ramah lingkungan. Greenpeace sendiri mulai ikut andil dalam membantu warga Batang pada tahun 2011 akhir hingga 2016 awal.

Greenpeace membantu warga Batang untuk terus berupaya dalam mempertahankan hak-hak mereka dan mencoba untuk menggagalkan proyek pembangunan PLTU Batang yang sangat merugikan. Greenpeace lebih mendukung dengan adanya penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan, karena sebagaimana dilihat bahwa Indonesia telah mengalami perubahan iklim yang cukup ekstrim akhir-akhir ini, dan prakiraan cuacapun terkadang tidak menentu, hal ini disebabkan karena pengaruh dari polusi yang setiap hari dihasilkan di Indonesia, dan apabila PLTU Batang ini tetap akan dibangun, maka kemungkinan besar bahwa perubahan iklim akan terus berlanjut kearah negatif yang tentunya berdampak buruk bagi umat manusia karena polusi yang dihasilkan dari PLTU Batang nantinya sangat besar melihat dari perencanaan proyek yang berkapasitas 2x1.000 MW.

Pada kasus pembangunan PLTU Batang sendiri, Greenpeace telah melakukan beberapa aksi nyata bersama dengan warga Batang untuk menekan pemerintah agar menghentikan pembangunan PLTU terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Beberapa aksi Greenpeace dalam membantu warga Batang ialah seperti melakukan protes damai di depan Istana Negara bersama dengan Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowereng, Wonokerso, Roban) yang merupakan perkumpulan warga dimana daerah mereka adalah daerah yang terkena terdampak dari pembangunan PLTU tersebut, Greenpeace dan warga Batang meminta kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan pembangunan PLTU di Batang.

Aksi lainnya ialah Greenpeace bersama 150 perwakilan warga Batang yang juga tergabung dalam Paguyuban UKPWR, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan LBH Semarang, mendatangi Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia untuk menyampaikan surat penolakan mereka terhadap pembangunan PLTU Batang, karena diposisi ini Jepang merupakan investor besar dalam pembangunan PLTU Batang. Aksi yang mereka lakukan ini merupakan respon dari hasil pertemuan Wakil Menteri Senior Kabinet Jepang Yasutsho Nishimura dengan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Hatta Rajasa terkait kelanjutan rencana pembangunan PLTU Batang, yang dimana dalam pertemuan tersebut Yasutosho Nishimura mendesak Hatta Rajasa untuk segera menyelesaikan masalah pembebasan tanah warga Batang agar pembangunan PLTU bisa segera direalisasikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah:

“Mengapa Greenpeace Melakukan Resistensi Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah?”

C. Kerangka Teori

Deep Ecology

Deep Ecology di munculkan oleh seorang professor filsafat asal Norwegia bernama Arne Naess. *Deep Ecology* mengusahakan gagasan *biospheric egalitarianism* yakni sebuah gagasan yang percaya bahwa semua makhluk hidup adalah sama dan setara dalam memiliki hak-haknya dan independen dari kegunaannya bagi manusia. *Deep Ecology* respek terhadap nilai intrinsik. Secara nyata, ini ditunjukkan dengan sikap-sikap seperti tidak menyebabkan kerusakan yang tidak perlu pada alam (Zimmerman, 2005). *Deep Ecology* adalah sebuah filsafat lingkungan kontemporer yang mengakui adanya nilai inheren dari *being-being* selain manusia. Nilai ini berada di luar nilai utilitas. Filsafat *Deep Ecology* menekankan hakikat interdependensi (kesalingtergantungan) antara manusia dan selain manusia dalam kepentingan ekosistem dan proses-proses alamiah. Prinsip mendasar *deep ecology* adalah keyakinan bahwa lingkungan hidup, sama seperti manusia, secara keseluruhan memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Pengertian kata *deep* pada *deep ecology* dimaksudkan bahwa gagasan pemikiran ini mempertanyakan pertanyaan lebih mendalam terkait mengapa dan bagaimana.

Serta, sangat memperhatikan pertanyaan mendasar filosofis tentang akibat dari kehidupan manusia sebagai salah satu bagian dari alam. *Deep Ecology* juga bertujuan untuk menolak baik antroposentrisme dan environmentalis-antroposentris. *Deep Ecology* berusaha menemukan pandangan lebih menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan berusaha mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata (Putra, 2011).

Delapan prinsip *Deep Ecology* (Taylor, 2000):

1. Keberadaan dan perkembangan kehidupan manusia dan benda-benda diluar manusia mempunyai nilai sendiri-sendiri yang tidak terkait dengan asas manfaatnya bagi manusia.
2. Kekayaan dan keberagaman bentuk-bentuk kehidupan akan mendukung realisasi dari nilai-nilai tersebut diatas.
3. Manusia tidak mempunyai hak untuk mengurangi kekayaan dan keberagaman bentuk-bentuk kehidupan tersebut, kecuali untuk memenuhi kebutuhan yang vital.
4. Perkembangan kehidupan manusia dan budayanya harus dapat diterima secara substansial dalam populasi manusia yang lebih kecil. Perkembangan kehidupan diluar manusia membutuhkan dukungan populasi manusia juga.
5. Gangguan keberadaan manusia kepada kehidupan diluar manusia semakin lama akan semakin memburuk.
6. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kebijakan/ideology harus diubah tidak lagi didasarkan pada struktur ekonomi dan teknologi.

7. Perubahan ideologi yang terutama adalah “menghargai kualitas hidup”, bukan sekedar menaikkan standar kehidupan.
8. Siapapun mempunyai kewajiban untuk segera melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

D. Hipotesa

Faktor-faktor yang mendorong Greenpeace melakukan resistensi-resistensi terhadap pembangunan PLTU Batang adalah karena Greenpeace menganggap proyek tersebut merupakan proyek yang menghasilkan pencemaran terhadap lingkungan dan merupakan representasi dari *Shallow Ecology* dan pembangunan PLTU ini juga berlawanan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Greenpeace yaitu *Deep Ecology*.

E. Metode Penelitian

1. Metode pengumpulan data

- a. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian
- b. Menghimpun data-data dari jurnal, artikel, surat kabar, dan browsing ke situs-situs terkait melalui internet.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dimana data-data dan fakta-fakta yang diperoleh akan dianalisis oleh teori dengan sistematis agar bisa mengorelasikan diantara fakta-fakta tersebut.

F. Tujuan penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan isu terkait perencanaan pembangunan PLTU Batang sejak era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sempat tertunda 4 tahun dan kemudian mulai di resmikan kembali pada era Joko Widodo (Jokowi) dan kemudian akan melihat bagaimana respon dari warga dan terutama Greenpeace sebagai Organisasi Lingkungan Internasional.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan waktu dalam penelitian skripsi ini penulis membatasi pada tahun 2011 hingga tahun 2016, karena pada saat itu perencanaan pembangunan PLTU Batang mulai digagas, dan dari jangka waktu 2011 hingga tahun 2016 akan menjelaskan apa saja yang telah terjadi dalam perencanaan proyek PLTU Batang dari awal hingga proyek ini bisa dimulai, dan juga melihat reaksi masyarakat Batang terhadap pembangunan PLTU Batang serta melihat kapan Greenpeace mulai berkontribusi untuk melakukan aksi penolakannya dalam pembangunan PLTU Batang.

H. Sistematika Penulisan 1

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Proses Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Batang

BAB III Advokasi Greenpeace dalam Menolak Pembangunan PLTU Batang

BAB IV Problem Lingkungan Pembangunan PLTU Batang

BAB V Kesimpulan